

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG

Atik Rochaeni¹⁾, Endah Christianingsih²⁾

1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

2) Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nurtanio, Indonesia

Abstrak

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dilakukan untuk mengetahui secara pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menggali berbagai sumber informasi primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan keadaan tertentu dari fakta yang terjadi pada proses penelitian berupa persepsi, perilaku, motivasi, serta tindakan dan yang lainnya dengan tidak memanipulasi fenomena yang telah diamati. Dimensi yang menjadi alat ukur implementasi yaitu: terkait ukuran dasar serta tujuan yang meliputi kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan berbagai kegiatan pelaksanaan, karakteristik dari badan-badan pelaksana, berbagai kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecenderungan pelaksana (Implementors).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, ukuran ideal pencapaian standar sasaran program belum tercapai secara optimal, sumber daya manusia cukup memadai, sedangkan sumberdaya finansial serta sumber daya fasilitas masih relatif kurang, komunikasi dengan transmisi/penyaluran informasi sudah berjalan dengan baik, jelas dan konsisten, struktur organisasi dapat bekerja dengan baik, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap dan jelas, namun dalam sisi kerja sama masih harus ditingkatkan, pengaruh program terhadap kondisi ekonomi dan sosial, terhadap opini publik cukup positif, dukungan elit politik yang baik, respon, pemahaman dan sikap yang serius dari agen pelaksana yang sudah baik namun perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Program Kampung Keluarga Berencana.

Abstract

Research on the implementation of policies regarding the Family Planning Village Program in Arjasari District, Bandung Regency was conducted to determine the implementation of these policies by exploring various sources of primary and secondary information using a descriptive qualitative approach that describes a certain situation from the facts that occur in the research process, both in the form of behavior, perceptions, motivations, actions and others without manipulating the observed phenomena. The dimensions that are used to measure implementation are: basic measures and policy objectives, policy resources, inter-organizational communication and implementation activities, characteristics of implementing agencies, economic, social and political conditions, and implementing tendencies. (Implementors).

The results of the study indicate that the implementation of policies regarding the Family Planning Village Program in Arjasari District, Bandung Regency, the ideal measure of achieving program target standards has not been optimally achieved, human resources are adequate, financial resources and facility resources are still relatively lacking, communication with transmission / distribution information is running well, clearly and consistently, the organizational structure can work well, the Standard Operating Procedure (SOP) is complete and clear, but in terms of cooperation still needs to be improved, the influence of the program on economic and social conditions, on public opinion is quite positive , good political elite support, response, understanding and serious attitude from implementing agencies that are already good but need to be improved.

Keywords: Policy, Policy Implementation, Family Planning Village Program.

PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dinilai banyak memberi dampak negatif dalam kehidupan berbangsa. Timbulnya dampak tersebut diantaranya berpengaruh terhadap lingkungan, yang pada akhirnya menimbulkan krisis energi dan pangan, karena terbatasnya sumber daya pangan dan energi merupakan akibat dari kerusakan lingkungan hidup, serta memberi pengaruh pada kesehatan lingkungan, terutama bagi masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh. Selain mempengaruhi lingkungan, adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak memadai sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, maka dapat menimbulkan pengangguran, kriminalitas serta rusaknya moral masyarakat karena berkaitan dengan tinggi dan rendahnya beban negara untuk memberikan kehidupan yang layak kepada setiap warga negaranya.

Upaya Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menanggulangi permasalahan tersebut, yaitu dengan menggalakkan program KB (Keluarga Berencana). Program KB Nasional adalah suatu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta mutu sumber daya manusia. Program tersebut yang sejak awal hingga sekarang diwujudkan melalui berbagai upaya seperti : pengaturan kelahiran, kematangan usia perkawinan, serta upaya peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Pedoman GBHN (Garis Besar Haluan Negara) lalu ditindaklanjuti melalui Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang telah dicanangkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000.

BKKBN diberikan kewenangan untuk mewujudkan agenda Nawacita sebagai agenda prioritas Presiden Joko Widodo beserta kabinetnya yang meliputi 9 program unggulan. Dalam hal ini yang menjadi sorotan utama, yakni pada pembangunan penduduk yang terdapat di urutan prioritas nomor 5 yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia di Indonesia melalui Pembangunan Kependudukan dan KB. Meskipun demikian, tugas pokok dari BKKBN yaitu menjaga stabilitas jumlah angka kelahiran dan kematian pertahun agar tidak terjadi ketidaksesuaian angka kelahiran dan kematian pertahunnya. Dengan demikian, BKKBN memunculkan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai program unggulan.

Program KKBPK memang menjadi kewenangan daerah di tingkat Kabupaten/Kota, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian, tiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan program KKBPK ini secara efektif dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Dalam pelaksanaannya, kebijakan BKKBN Pusat sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program KKBPK secara nasional dijadikan acuan.

Pada Tahun 2016 Presiden Joko Widodo membumihngkan Program Keluarga Berencana Nasional, yang saat ini dikenal dengan Program KKBPK, yaitu dengan mencanangkan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Kampung KB tersebut merupakan realisasi dari Program KKBPK yang intinya merupakan upaya pemerintah mengendalikan peningkatan jumlah penduduk, juga yang lebih utama sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tersebut dapat berkembang menjadi masyarakat yang mandiri serta sejahtera. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, tentunya diperlukan perencanaan kegiatan program KKBPK di desa sebagai *prototype* Kampung KB di masing-masing

kabupaten/kota diseluruh Indonesia didasarkan pada kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa yang terpilih sebagai Kampung KB.

Keberadaan kampung KB dapat menjadi suatu solusi yang tepat untuk dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, hal tersebut dikarenakan adanya kampung KB di Kabupaten Bandung saat ini dengan jumlah 86 yang tersebar di 31 Kecamatan dengan jumlah Posyandu 4.288 buah, yang terdiri dari 738 Madya, 1.601 Purnama dan 1.949 Mandiri. Terlihat dari jumlah posyandu tersebut, pembangunan KB di Kabupaten Bandung dapat dikatakan sangat luar biasa. Selain itu, Kabupaten Bandung tidak memiliki posyadu pratama. Dengan potensi tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung dapat memberikan arahan lain dengan mengeluarkan inovasi agar masyarakat dapat memahami apa saja fungsi keluarga, sehingga program Sabangsa dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung dan komponen pembangunan daerah harus mengadakan berbagai langkah penguatan program KKBPK yang tepat sasaran. Oleh karenanya, penguatan sinergitas dan komitmen para *stakeholders* di seluruh tingkatan wilayah harus dilakukan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera serta masyarakat yang maju, mandiri dan berdaya saing, dan tujuan akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di wilayah Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana telah berjalan namun belum optimal, pelaksanaan program KKBPK di Kecamatan Arjasari saat ini dihadapkan pada beberapa persoalan, seperti perbedaan pandangan terhadap KB dan ketidakselarasan produk hukum terkait kependudukan dan KB, serta laju pertumbuhan penduduk yang cenderung masih tinggi, yakni 1,63%, dan masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJT (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yaitu sekitar 24,94% dari total akseptor dan masih

kurangnya pengetahuan remaja terkait isu tentang reproduksi yang sehat. Fenomena tersebut dirasakan menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah program, sehingga digunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn sebagai acuan dalam penelitian ini. Menurutnya, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan hasil pemaparan pendahuluan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah cara pemecahan masalah yang diteliti dengan langkah menggambarkan dan memahami apa yang dilihat secara alamiah, serta didasarkan pemahaman dari kenyataan dilapangan. Penggunaan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi secara menyeluruh terkait dengan fokus penelitian.

Guna mendapatkan data primer maupun sekunder, maka peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian, yakni wawancara mendalam, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Sementara itu, untuk informan ditentukan atas pertimbangan bahwa informan tersebut dianggap mengetahui dan dapat memberikan data serta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

TABEL
INFORMAN PENELITIAN

Kategori Informan	Peran Informan
Informan dari unsur pemerintah tingkat Dinas	Sekretaris DP2KBP3A Kabupaten Bandung
	Kasi Bina Ketahanan Keluarga, Anak Balita dan Lansia DP2KBP3A Kabupaten Bandung
Informan dari unsur pemerintah tingkat Kecamatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
Informan dari unsur pemerintah tingkat Desa	Sekretaris Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
Informan dari unsur masyarakat	Pengurus Kampung KB di Kampung Cipeuteuy Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
	Tokoh Masyarakat di RW 06 Kampung Cipeuteuy Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
	Tokoh Masyarakat di RW 08 Kampung Cipeuteuy Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
	Tokoh pemuda di Kampung KB Mandiri Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa informan dalam penelitian ini meliputi informan dari unsur pemerintah tingkat Dinas, informan dari unsur pemerintah tingkat Kecamatan, informan dari unsur pemerintah tingkat Desa dan informan dari unsur masyarakat sebagai pengurus Kampung KB, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kampung KB Mandiri pada salah satu wilayah Kabupaten Bandung yang dianggap mampu memberikan informasi dan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil penelitian yang kredibel, prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Pada dimensi ukuran- ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, indikator pertama yang digunakan dalam mendalami penelitian Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung adalah ukuran ideal pencapaian standar dan sasaran program, untuk mengetahui seperti apa ukuran ideal pencapaian standar dan sasaran program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dan bagaimana cara mencapainya.

Ukuran ideal pencapaian standar dan sasaran program Kampung KB di Kecamatan Arjasari adalah meningkatnya capaian program KKBPK di Kampung KB (kesertaan KB MKJP, kesertaan jumlah keluarga yang aktif dalam BKB-HI, BKR, dan PIK-R, BKL, serta UPPKS. Meningkatnya pengetahuan remaja dan keluarga tentang isu-isu kependudukan), Meningkatnya jumlah program kegiatan lintas sektor di Kampung KB, dengan menjalankan 4 langkah mekanisme operasional kampung KB, yaitu : perencanaan, koordinasi dengan lintas sektor, sosialisasi kegiatan, dan monitoring dan evaluasi. kemudian tersedianya sistem pencatatan dan pelaporan untuk setiap seksi atau pelaporan *online*. Cara mencapainya dengan kerja keras tim DP2KBP3A, Pihak Pemerintahan Kecamatan Arjasari, dan peran serta aktif seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, ukuran ideal pencapaian standar dan sasaran program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dapat diukur melalui hasil peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan 8 fungsi keluarga dengan baik yang berorientasi dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan terbebasnya masyarakat dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Pendalamam pada dimensi ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan pada implementasi kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, diukur dengan indikator kedua yaitu tingkat pencapaian tujuan program, untuk

mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian tujuan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung selama ini. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan keluarga kecil berkualitas dengan semangat kebersamaan dan kemandirian, tingkat pencapaian tujuan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung sudah cukup baik meskipun masih banyak hal yang harus ditingkatkan, terutama dari sisi kesadaran masyarakat akan pentingnya Program Keluarga Berencana. Adapun terbentuknya Kampung KB, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Tujuan tersebut belum dapat diraih secara menyeluruh di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, akibat partisipasi masyarakat yang belum optimal. Tujuan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dalam pandangan masyarakat belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, walaupun tidak dapat dipungkiri, sedikit-banyaknya sudah memberikan pengaruh yang baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menaikkan kualitas keluarga.

Dimensi ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang menggunakan indikator ketiga yaitu manfaat yang dirasakan, digali sejelas-jelasnya bagaimana manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan pemerintah dengan adanya program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, melalui pengamatan/observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi, yakni dengan adanya program Kampung KB menurut informan adalah: terwujudnya upaya pengentaskan kemiskinan, mendekatkan pembangunan kepada masyarakat, membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor.

Dengan mengkaji hasil dari pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan, baik dari unsur pemerintahan maupun dari unsur masyarakat, mengemuka hal yang jelas mengenai manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya pelaksanaan program Kampung KB di

Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Kenyataan tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga dan perbaikan lingkungan, peningkatan kegairahan menjalankan kegiatan ekonomi, serta meningkatnya wawasan dan kecerdasan masyarakat dalam menggapai kesuksesan di masa depan.

Sumber-sumber kebijakan

Dimensi pertama dari sumber-sumber kebijakan mendalami ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk pelaksanaan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Pada indikator ketersediaan sumber daya manusia, digali bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dari segi kuantitas dan kualitasnya untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, karena sumber daya manusia merupakan salah satu modal utama dalam implementasi sebuah kebijakan.

Diperoleh informasi, bahwa dalam hal ketersediaan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, pada tingkat Dinas secara kualitas sudah cukup baik, namun secara kuantitas masih relatif kurang. Sebaliknya, kalau dari unsur masyarakat secara kualitas masih harus terus ditingkatkan, tetapi secara kuantitas sudah cukup memadai.

Sementara itu, ada pendapat yang mengklasifikasikan sumber daya manusia berdasarkan status kepegawaian, yakni terdapat dua sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Pertama, SDM dari unsur birokrasi yang mempunyai gaji dari pemerintah; Kedua, SDM dari unsur masyarakat (pengurus & kader) yang bekerja secara suka rela. Kedua unsur SDM tersebut jelas memiliki kualitas yang berbeda, tetapi secara kuantitas dari unsur masyarakat jumlahnya lebih banyak.

Mengamati dan mengkaji sejumlah keterangan yang didapat dalam penelitian ini berdasarkan indikator ketersediaan sumber daya manusia, diketahui bahwa sumber daya manusia dalam implementasi program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas cukup berbeda, mengingat secara jumlah masih

relatif kurang, walaupun secara kualitas rata-rata keseluruhan cukup baik. Hal tersebut dipengaruhi banyak hal, termasuk perbedaan status kepegawaian, tingkat kesadaran, motivasi kerja, dan tingkat pemahaman regulasi yang berbeda-beda.

Indikator kedua dalam mengukur dimensi sumber-sumber kebijakan adalah mekanisme penganggaran dan kecukupan anggaran, untuk mengetahui bagaimana mekanisme penganggaran dan kecukupan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, baik yang bersifat *top down* maupun *bottom up*. Alur penganggaran secara *top down* : Mekanisme penganggaran pelaksanaan Program Kampung KB dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat, melalui Pokja Kampung KB di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan krusial pelaksanaan program. Sementara itu, mekanisme penganggaran Program Kampung KB dari alur *bottom up* : Penganggaran program Kampung KB dilaksanakan melalui musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes), dan untuk anggarannya berasal dari BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi, APBD, dan juga dari ADD.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada sejumlah informan baik dari unsur pemerintahan maupun unsur masyarakat dalam indikator mekanisme penganggaran dan kecukupan anggaran program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dilakukan dengan dua cara yaitu *top down* dan *bottom up*. Anggaran yang sudah disiapkan setiap tahunnya melalui program kegiatan yang disusun dari atas (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten), serta anggaran yang diajukan dari bawah yang dimulai dari penyusunan jenis-jenis kegiatan dan kebutuhan anggarannya dari pengurus Kampung KB yang kemudian diajukan dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya diajukan ke Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten.

Sumber anggaran Program Kampung KB berasal dari BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi, APBD Kabupaten, dan juga dari ADD. Dalam penelitian ini mengemuka bahwa anggaran tersebut pada tingkat Kampung KB belum cukup memadai untuk dapat melaksanakan keseluruhan agenda kegiatan

yang sudah disusun dan ditetapkan, sehingga dibuat langkah kebijakan dengan cara skala prioritas.

Pada dimensi sumber-sumber kebijakan, indikator ketiga adalah tentang ketersediaan dan kecukupan fasilitas, untuk menggali informasi sedalam-dalamnya bagaimana ketersediaan dan kecukupan fasilitas/sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari menurut pendapat informan, telah dipenuhi oleh Bupati Bandung melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya digali dari Sumber Daya Manusia pada Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di kampung KB, yang merupakan wujud partisipasi dari masyarakat. Namun disisi lain, ada pendapat yang menyatakan kondisi ketersediaan fasilitas/sarana prasarana pendukung Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, bahwa fasilitas pendukung pelaksanaan Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung memang sudah tersedia, tetapi belum lengkap sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok kegiatan yang ada. Selama ini, semua kegiatan masih berpusat di sekretariat pengurus Kampung KB. Rumah Data Kependudukan, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, dan bidang-bidang lainnya belum memiliki tempat dan peralatan sendiri.

Berdasarkan dari keterangan para informan yang ditunjang hasil pengamatan peneliti, terlihat realita bahwa dalam indikator ketersediaan dan kecukupan fasilitas/sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung masih belum memadai dan cenderung banyak kekurangan. Hal itu nampak pada sebagian besar Kampung KB, belum tersedianya fasilitas rumah literasi, serta fasilitas untuk konseling remaja di beberapa desa belum ada. Rata-rata fasilitas/sarana prasarana yang tersedia di setiap Kampung KB hanya sebatas timbangan bayi dan timbangan lansia, serta meteran pengukur tinggi tubuh.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan

Indikator pertama dalam dimensi komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan, yaitu tentang penyaluran informasi/sosialisasi. Indikator ini menggali informasi tentang pola penyaluran informasi/sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, cara yang digunakan, dan lancar tidaknya proses sosialisasi.

Penyaluran informasi/sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh Pokja Kampung KB dari DP2KBP3A, Kecamatan Arjasari, dan Kader Kampung KB sebagai ujung tombak dalam pemerataan informasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dalam beberapa cara, yaitu diantaranya pembuatan papan nama dan juga memanfaatkan media cetak seperti banner, baliho, dll. Sosialisasi bentuk lain yaitu penyuluhan secara langsung terkait program Kampung Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaan sosialisasi tidak jarang menemui kendala, misalnya masih kurangnya jumlah peserta yang hadir dari unsur masyarakat.

Mengkaji sejumlah keterangan informan, melalui indikator penyaluran informasi/sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, diperoleh gambaran bahwa meskipun sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik bahkan dengan berbagai cara, bukan hanya melalui pertemuan-pertemuan/penyuluhan langsung, tetapi juga dengan memanfaatkan berbagai media dan sarana *platform* digital, namun pada tingkat terendah di lapisan masyarakat, masih dikeluhkan terjadinya ketidak merataan informasi (terutama penyuluhan) yang hanya melibatkan penggiat-penggiat lama di masyarakat dan kurang melibatkan unsur masyarakat lainnya secara luas.

Dalam mendukung hasil pengukuran pada indikator pertama, indikator mengukur tingkat kejelasan informasi, untuk mengetahui masalah kejelasan informasi pada sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, apakah cukup jelas dan mudah dipahami atau sebaliknya, dan menggali alasannya.

Informasi pada sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, sudah cukup jelas sebenarnya, namun masih saja terdapat masyarakat yang belum benar-benar memahami manfaatnya. Hal tersebut terjadi karena frekuensi sosialisasi dan tingkat kehadiran masyarakat yang masih kurang banyak.

Menyimak penjelasan-penjelasan informan, masalah kejelasan informasi dari materi sosialisasi kebijakan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung ditangkap sebagian masyarakat dengan cukup jelas, bahkan ada masyarakat yang secara pro aktif menggali dan mempelajari informasi melalui *platform digital*, seperti media *online*, *website* BKKBN dan media sosial. Namun sayangnya masih ada penghambatnya, dalam hal ini adalah tingkat partisipasi masyarakat yang dinilai masih kurang, dan adanya sikap kurang merangkul semua kalangan masyarakat dari para pengurus Kampung KB dan para kader yang terlibat.

Dalam dimensi komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan, digunakan indikator ketiga yaitu tingkat konsistensi sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung sudah cukup konsisten dilakukan, apalagi yang melalui media cetak dan media luar ruang yang selalu terpasang terutama di kantor-kantor pemerintahan desa dan kecamatan, juga di posyandu. Hanya saja sosialisasi yang bersifat tatap muka tidak secara terus menerus dilakukan, mengingat adanya kendala pandemi *Covid-19*.

Tingkat konsistensi sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung berdasarkan sejumlah keterangan informan dan hasil pengamatan peneliti pada beberapa lokasi pelaksanaan Program Kampung KB secara umum sudah cukup konsisten, namun belum cukup menyasar secara keseluruhan terhadap semua kalangan masyarakat yang seharusnya menerima materi sosialisasi tersebut.

Karakteristik Badan Pelaksana

Kinerja struktur organisasi pengurus dalam melaksanakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, mulai dari Pokja Provinsi, Kabupaten sampai tingkat Kecamatan dirasakan cukup baik, karena sepenuhnya mengikuti pedoman dari buku petunjuk teknis Kampung Keluarga Berencana. Disamping itu, secara normatif kinerja jajaran pengurus dari mulai Pokja hingga Kader Kampung KB dan jajaran birokrasi yang ada mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan sudah cukup baik dan patuh terhadap aturan yang berlaku, hanya saja masih kurang memanfaatkan partisipasi masyarakat terutama kalangan muda yang memiliki pendidikan tinggi dan diyakini akan lebih berkontribusi kepada pelaksanaan Program Kampung KB.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, sudah tersedia. SOP yang digunakan yaitu diantaranya buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana, mulai dari awal kegiatan hingga tahap akhir yaitu laporan dan juga evaluasi program semua mengikuti buku petunjuk teknis tersebut. Ketersediaan buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung KB menjadi panduan SOP pelaksana kebijakan. Dalam pelaksanaan SOP, pokja dan kader mengerjakan terlebih dahulu poin-poin yang menjadi skala prioritas, karena tidak mungkin keseluruhan program dilaksanakan sekaligus.

Berdasarkan keterangan informan penelitian dan mengkaji hasil pengamatan dilengkapi dengan hasil pengumpulan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur sebagai panduan teknis sudah tersedia cukup lengkap, detail, dan jelas. SOP tersebut akan terlihat hasilnya secara optimal apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh semua jajaran implementor kebijakan.

Berikutnya, mengenai harmonisasi kerjasama yang dilakukan oleh pengurus Kampung KB dengan unsur Pemerintah tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung dalam melaksanakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Kerjasama merupakan langkah strategis dalam melaksanakan sebuah kebijakan, terlebih dalam program Kampung KB. Kebijakan tersebut memerlukan keterlibatan lebih banyak dari pihak-pihak lain yang terkait. Kerjasama selalu dilakukan oleh pengurus Kampung KB, Kader Kampung KB dengan unsur Pemerintah tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung untuk menjalankan kebijakan guna mendapatkan dampak positif serta tujuan yang ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Berdasarkan pendapat dan masukan dari informan, dan hasil pengamatan di lapangan yang dilakukan peneliti, kerjasama yang dilakukan oleh pengurus Kampung KB dengan unsur Pemerintah tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, sudah terjalin cukup baik. Namun kerjasama tersebut perlu ditingkatkan dan diperluas dengan instansi lain (lintas sektor) dan juga pihak ketiga yang sebenarnya mempunyai program yang berhubungan dengan kepedulian sosial (CSR) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program Kampung KB, seperti perusahaan farmasi dan alat-alat kesehatan, atau bahkan menggali potensi program CSR dari perusahaan-perusahaan besar, BUMN, dan BUMD, dan juga yang lainnya.

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kontribusi program terhadap perkembangan ekonomi adalah indikator pertama yang digunakan untuk mencari tahu bagaimana bentuk kontribusi Program Kampung Keluarga Berencana terhadap perkembangan perekonomian di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, tingkat

kecukupan berkontribusinya, dan mengungkap alasan yang menyertainya.

Dari sisi kontribusi ekonomi, bentuk kontribusi program Kampung Keluarga Berencana terhadap perkembangan perekonomian di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung cukup nyata. Selain dengan adanya Kampung KB yang menciptakan keluarga kecil yang sejahtera karena membatasi jumlah anak, dalam kegiatan kelompok kerja terdapat kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang melaksanakan pembinaan keterampilan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

Kegiatan usaha kecil/keluarga yang merupakan hasil dari pembinaan dalam salah satu kegiatan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, yaitu bahwa dari delapan fungsi keluarga, fungsi ekonomi merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Kehadiran Program Kampung KB dirasakan masyarakat telah memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ekonomi. Banyak kelompok masyarakat yang mengikuti Program Kampung KB yang telah memiliki kegiatan usaha dalam menopang ekonomi keluarganya.

Kontribusi Program Kampung Keluarga Berencana terhadap perkembangan perekonomian di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung berdasarkan hasil pengamatan di beberapa lokasi Kampung KB dan atas keterangan sejumlah informan dalam penelitian ini memberikan gambaran adanya kontribusi yang cukup nyata bagi masyarakat dalam mendorong perkembangan ekonomi. Terbukti kegiatan-kegiatan usaha kecil/keluarga bermunculan dengan berbagai produk hasil keterampilan tangan, industri pakaian jadi, kuliner dan bidang usaha lainnya, yang juga sudah dapat memanfaatkan majunya perkembangan teknokogi informasi berupa kehadiran *marketplace* dan media sosial.

Selanjutnya, kondisi sosial dan politik di Kecamatan Arjasari setelah dilaksanakannya Program Kampung KB menjadi lebih baik, hal ini cukup dirasakan oleh masyarakat. Program kampung KB berhasil menekan angka pengangguran, kriminalitas dan rusaknya moralitas masyarakat karena berhubungan dengan tinggi rendahnya beban negara untuk

memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warga negaranya. Sementara dari sisi politik, dengan kesejahteraan dan ketenteraman yang tercipta di masyarakat, terbukti partisipasi politik masyarakat semakin meningkat secara positif, terlihat dari kenaikan angka partisipasi dalam Pemilu, Pileg, dan Pilkada.

Berbagai jenis kegiatan dalam pelaksanaan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung yang menjadi penyebab makin baiknya kondisi sosial dan situasi politik, diungkapkan informan bahwa salah satu kegiatan lintas sektor Program Kampung KB adalah penataan pemukiman penduduk yang berorientasi pada kenyamanan hidup bersama bagi masyarakat. Kegiatan bina keluarga, bina lansia, dan konseling remaja, serta kegiatan-kegiatan lainnya menjadikan semakin nyaman dan tertibnya kondisi sosial masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut juga menjadikan situasi politik di masyarakat lebih kondusif dan makin jauh dari perselisihan akibat perbedaan kepentingan politik.

Dukungan elit politik terhadap sebuah kebijakan akan mendorong semakin terbukanya peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan. Para elit politik, baik yang berkuasa maupun pihak oposisi di Kabupaten Bandung semuanya memberikan dukungan yang baik pada Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Bentuk dukungan mereka terlihat dalam setiap pembahasan Program Kampung KB tidak pernah ada yang menyanggah atau mempersulit pelaksanaan kebijakan. Jaringan elit politik, menurut Pengelola Pemerdayaan Masyarakat Kecamatan Arjasari dalam menyikapi pelaksanaan Program Kampung KB tidak lagi terkotak-kotak dalam lingkaran kepentingan politiknya masing-masing.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, maka dapat dikemukakan bahwa tingkat dukungan elit politik terhadap program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, cukup baik, tanpa memperlihatkan warna dan haluan politik ataupun posisi pihak yang berkuasa ataupun oposisi, semua elit politik mendukung program ini. Bentuk dukungan mulai dari tingkat perumusan kebijakan, pembentukan tim pelaksana program, implementasinya dengan dukungan sosialisasi dan sokongan anggaran seperti halnya peyaluran dana aspirasi DPRD

Kabupaten Bandung.

Kecenderungan pelaksana (*implementors*)

Kecenderungan pelaksana (*implementors*) adalah sikap keseluruhan pelaksana kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung yang dibedah melalui Respon *implementor* terhadap setiap masalah yang terjadi dalam melaksanakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, pemahaman *implementor* terhadap kebijakan dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dan sikap *implementor* dan pengurus Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Arjasari dalam menangani masyarakat yang tidak mau ikut Program Keluarga KB.

Pada indikator pertama yaitu respon *implementor*, digali informasi secara luas, bagaimana respon *implementor* terhadap setiap masalah yang terjadi dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, bentuk responnya, dan alasan yang mendasarinya, sehingga diperoleh gambaran objektif tingkat pengaruhnya terhadap pelaksanaan kebijakan program Kampung KB.

Ketika menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada pelaksanaan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, para *implementor* kebijakan menunjukkan respon yang selalu baik. *Implementor* kebijakan tidak hanya mengandalkan pengurus dan kader Kampung KB, namun dari tingkat Dinas maupun Kecamatan selalu turun tangan dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah secara persuasif, yaitu dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat kekeluargaan.

Mencermati keterangan yang disampaikan semua informan di atas, dan hasil pengamatan langsung di lapangan, maka dapat disampaikan bahwa Respon *implementor* terhadap setiap masalah yang terjadi dalam melaksanakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, cukup baik. Mereka sering bergerak cepat menangani masalah di kalangan masyarakat melalui cara persuasif, yaitu pendekatan dan pembinaan bertahap yang dapat diterima dan dipahami masyarakat.

Selanjutnya mengenai pemahaman *implementor*, digali dari

informasi mengenai tingkat pemahamannya terhadap kebijakan dalam melaksanakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Pemahaman yang dimaksud adalah mengenai regulasi program dan petunjuk teknisnya, sehingga dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pandangan salah seorang informan menyatakan bahwa tingkat pemahaman implementor terhadap kebijakan dalam melaksanakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, cukup baik. Hal tersebut dikarenakan selain sumber daya kebijakan yang lengkap, juga petunjuk teknis dan pelatihan-pelatihan tentang Kampung KB sering dilaksanakan. Pemahaman akan kebijakan menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki para pelaksana kebijakan Kampung KB, bahkan tidak hanya para pelaksana yang harus paham, melainkan juga lapisan masyarakat luas juga sebaiknya ikut memahami poin-poin kebijakan sehingga dapat berpartisipasi lebih optimal dalam mensukseskan pelaksanaan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Implementor kebijakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dari mulai tingkat Dinas, Kecamatan, sampai ke Desa cukup baik. Mereka sudah mempelajari konten kebijakan dan petunjuk teknis secara detail. Dengan implementasi yang terus-menerus di lapangan, maka pemahaman akan isi kebijakan semakin baik.

Selanjutnya, dalam menggali informasi objektif tentang dimensi yang mendalami adanya respon, pemahaman dan sikap yang serius dari agen pelaksana, pada indikator diukur berdasarkan sikap implementor untuk mengetahui secara pasti sikap implementor dan pengurus Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Arjasari dalam menangani masyarakat yang tidak mau ikut Program Keluarga KB. Sekretaris DP2KBP3A Kabupaten Bandung, menjelaskan bahwa sikap implementor dan pengurus Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Arjasari dalam menangani masyarakat yang tidak mau ikut program Kampung KB ditunjukkan dengan cara yang bijaksana, yakni melalui pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya Program Kampung KB yang pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat.

Program Kampung KB merupakan sebuah program sosial kemasyarakatan yang harus diikuti secara suka rela dari masyarakat atas kesadaran yang muncul dari arti pentingnya dan manfaat Kampung KB dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam menangani masyarakat yang tidak mau ikut program Keluarga KB, para implementor kebijakan tidak bersikap arogan, tetapi dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara personal dan kelompok dengan cara yang bijak, dengan secara perlahan-lahan memberikan penjelasan tujuan dan manfaat yang akan diraih keluarga dan masyarakat dalam mengikuti program Kampung KB.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dapat dikatakan bahwa penentuan ukuran ideal pencapaian standar dan sasaran program kurang kondisional dan adaptif dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, khususnya dalam menentukan skala prioritas program yang hanya mengikuti petunjuk secara nasional. Masih kurang melibatkan sumber daya manusia dari kalangan anak muda yang berpendidikan tinggi dan pengurus Kampung KB masih didominasi aktivis sosial yang sudah karatan. Masalah finansial dan fasilitas pendukung masih sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah, belum ada upaya menggali dari pihak lain (swasta) misalnya dalam program CSR. Sosialisai program Kampung KB belum menysasar ke seluruh lapisan masyarakat dan lebih banyak disampaikan ke pihak-pihak yang sudah terbiasa hadir/aktif dalam kegiatan-kegiatan RW dan desa. Kerjasama antara pengurus Kampung KB lebih banyak dilakukan dengan instansi pemerintahan yang ada kaitannya dengan kepentingan saja. Selain itu, kerjasama dengan instansi lain yang di Kabupaten Bandung, serta pihak ketiga/swasta, jarang dilakukan. Program pengendalian kelahiran anak masih menjadi prioritas utama dan kegiatan pelatihan peningkatan ekonomi keluarga volume dan frekuensinya masih sangat kurang. Masih terdapat kader dan pengurus Kampung KB yang mewariskan jabataban kepengurusannya kepada keluarga terdekat tanpa memperhitungkan kompetensi SDM-nya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- BKKBN. (2015). *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi: Cetakan Ke-5*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Dunn, W. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Islamy, I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor dalam proses perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Parson, W. (2011). *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group.
- Santoso, P. (2008). *Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Suharno. (2010). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suryani, S. (2009). *Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga Berencana Pada Kelompok Ibu di Wilayah Puskesmas I Sukoharjo*. Surakarta: FIK Universitas Muhammadiyah.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, B. (2012). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wiyoto, B. (2005). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Griya Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Keppres Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen